

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Setiap negara tentu berkeinginan untuk mewujudkan kehidupan masyarakatnya yang adil, makmur, dan merata, begitu juga dengan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu contoh negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Menurut Waluyo (2011:2), Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual.

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa pengadaan dana inilah yang merupakan komponen terpenting dalam tercapainya tujuan pembangunan nasional suatu negara. Sumber pembiayaan pembangunan bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan daripada di luar negeri. Hal ini juga merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunannya, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dalam peningkatan dana dalam negeri, penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN.

Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2019 tercatat bahwa besaran pendapatan negara pada tahun ini direncanakan mencapai Rp 2.142,5 triliun. Dengan perincian sebagai berikut: penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu sebesar Rp 361,1 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 0,4 triliun.

Penerimaan negara dari sektor pajak ini dapat digunakan untuk mendanai pembangunan Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai. Namun hal penting yang harus diingat, bahwa masalah perpajakan

bukan hanya masalah pemerintahan saja. Masyarakat juga mempunyai keterlibatan dalam masalah perpajakan Indonesia. Dengan itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran kepedulian untuk membayar pajak. Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Adapun tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri.

Namun dalam kegiatan penerimaan pajak, tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari masyarakat maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak. Penagihan pajak yang efektif juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menyelesaikan masalah terkait timbulnya tunggakan pajak, sekaligus membantu tercapainya target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak.

Kegiatan penagihan bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam tindakan penagihan pajak, peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat paksa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, menjelaskan bahwa:

“Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita”.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ilir Timur Palembang terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak di wilayah kerjanya melalui kegiatan penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa. Tabel 1.1 menunjukkan target dan realisasi penagihan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2017-2018**

Tahun	Target Pencairan Tunggakan dengan Surat Teguran	Realisasi Pencairan Tunggakan dengan Surat Teguran	Target Pencairan Tunggakan dengan Surat Paksa	Realisasi Pencairan Tunggakan dengan Surat Paksa
2017	27.041.986.830,82	14.990.336.026	6.828.086.828	271.296.949
2018	98.337.464.755,90	8.654.559.671	24.535.872.804	595.672.035

*Sumber: Laporan Tindakan Penagihan Pajak KPP Pratama Ilir Timur Palembang, 2019*

Dalam melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, KPP Pratama Ilir Timur Palembang harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir dengan judul **“Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Hasil Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam hasil penerimaan pajak?
2. Seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam hasil penerimaan pajak?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembatasan atas pembahasan dari permasalahan ke dalam satu ruang lingkup sangat penting. Hal ini bertujuan agar dalam pembahasan permasalahan ini dapat lebih terfokus dan terarah sehingga dapat diambil hasil pembahasan yang baik. Dengan demikian pembahasan dibatasi hanya pada analisa tingkat efektivitas dan kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam hasil penerimaan pajak di KPP Pratama Ilir Timur Palembang selama tahun 2017 dan 2018. Wilayah kerja KPP Pratama Palembang Ilir Timur meliputi 6 (enam) kecamatan yang terdiri atas 41 (empat puluh satu) kelurahan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulis ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam hasil penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang.

### 1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan saran serta informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama IIR Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dimasa yang akan datang.

3. Bagi Lembaga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Sriwijaya di masa yang akan datang.

## 1.5 Metodologi Pengumpulan Data

### 1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu yang telah terjadi dan dapat dijadikan fakta atau bukti untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam penyusunan laporan akhir ini dibutuhkan data yang andal, akurat, dan objektif serta mendukung sebagai bahan analisis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan laporan akhir ini, diperlukan data yang akurat untuk menganalisis permasalahan. Metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data menurut Sugiyono (2013:224), yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dan meneliti melalui buku-buku peraturan-peraturan, karya ilmiah, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu studi yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung perusahaan atau badan usaha yang menjadi objek penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara (*Interview*)  
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
- b. Angket (*Quisioner*)  
Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
- c. Pengamatan (*Observation*)  
Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan akhir ini sebagai berikut:

1. Riset Perpustakaan (*Library Research*)

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dan meneliti melalui buku-buku peraturan-peraturan, karya ilmiah, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

2. Riset Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Pengamatan (*observation*) secara langsung pada pelaksanaan kegiatan operasi perusahaan.

### 1.5.2 Sumber Data

Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis membutuhkan data yang akurat dan relevan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Menurut Sugiyono (2013:137) data dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau dikumpulkan oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.

Bedasarkan sumber pengumpulan data, maka penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu laporan penerimaan pajak selama tahun 2017-2018, laporan tindakan penagihan pajak selama tahun 2017-2018 serta data-data lain yang terkait dengan variabel yang dibutuhkan dalam penulisan laporan tindakan penagihan pajak berdasarkan jumlah penerbitan surat teguran dan surat paksa selama tahun 2017-2018.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi laporan akhir secara ringkas dan jelas sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab. Penulisan ini terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis mengungkapkan tentang apa yang melatar belakangi penulis dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi objek tempat penulis melakukan penelitian, sebagai berikut latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, akan diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan laporan akhir yang meliputi pengertian pajak, dasar penagihan pajak, penagihan pajak berdasarkan surat teguran dan surat paksa, dan pengertian efektivitas.

#### **BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Berisi tentang gambaran umum instansi yang berupa sejarah singkat instansi, struktur organisasi, pembagian divisi tugas, dan aktivitas instansi.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini, hasil dan pembahasan berdasarkan bab-bab sebelumnya dengan mendeskripsikan hasil dan pembahasan penulisan berdasarkan data yang telah diperoleh.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah serta penulisan berikutnya.